

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Pemalang yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Adapun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah tercantum pada tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.

7.2 Program Prioritas Perangkat Daerah Beserta Kebutuhannya

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 14 (empat belas) unsur kewilayahan dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengelolaan pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal
- b. Program pengembangan kurikulum difokuskan pada pengembangan kurikulum lokal
- c. Program pendidik dan tenaga kependidikan difokuskan pada pemerataan tenaga pendidikan dan pendidik

2. Kesehatan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat difokuskan pada implementasi SPM dan peningkatan kualitas sarana kesehatan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan pemeriksaan makanan dan minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan desa

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) difokuskan pada penanganan banjir dan irigasi
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum difokuskan pada pemenuhan SPM
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah difokuskan pada pelayanan limbah domestik baik terpadu maupun individu dan pembangunan IPLT
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase difokuskan pada perbaikan drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung difokuskan pada rehabilitasi gedung kantor dan bangunan skala kabupaten
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan difokuskan pada jalan yang menghubungkan wilayah dan perekonomian
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang difokuskan pada pemanfaatan ruang sesuai tata ruang

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)



- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum difokuskan pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang humanis sesuai SPM.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kebakaran dalam *response time* sesuai SPM dan peningkatan peran serta relawan kebakaran.
- c. Program Penanggulangan Bencana difokuskan pada penanganan SPM

6. Sosial:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial difokuskan pada pemberdayaan PSKS
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan difokuskan pada koordinasi penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
- c. Program Rehabilitasi Sosial difokuskan pada penanganan SPM di luar panti
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial difokuskan pada peningkatan kualitas data kemiskinan, pemberian program perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BST).
- e. Program Penanganan Bencana difokuskan pada penanganan korban bencana sebagaimana SPM
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Tenaga kerja:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja skla makro dan mikro
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja difokuskan pada penempatan tenaga kerja
- d. Program Hubungan Industrial difokuskan pada peningkatan kerja sama tripartit dalam penanganan hubungan industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan difokuskan pada peningkatan anggaran responsif gender



- b. Program Perlindungan Perempuan difokuskan pada penanganan dan pencegahan korban kekerasan perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga difokuskan pada pemberdayaan keluarga rentan
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak difokuskan pada perwujudan data pilah gender
- e. Program Pemenuhan Hak Anak difokuskan pada peningkatan sekolah ramah anak, kelurahan/desa ramah anak
- f. Program Perlindungan Khusus Anak difokuskan pada penanganan korban kekerasan pada anak dan perlindungan pada anak berkebutuhan khusus

3. Pangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan difokuskan pada penguatan cadangan pangan
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan dan B2SA
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penanganan kerawanan pangan masyarakat
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada keamanan pangan dan penyediaan pangan segar

4. Pertanian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan difokuskan pada penyelesaian sengketa pertanahan pemerintah daerah dengan masyarakat/ pihak lain
- b. Program Penatagunaan Tanah difokuskan pada fasilitasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

5. Lingkungan hidup:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan dan pencegahan pencemaran air dan udara
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) difokuskan pada pemenuhan ruang terbuka hijau
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) difokuskan pada penataan perusahaan yang menyimpan dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) difokuskan pada pembinaan dan pengawasan PPLH
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada peningkatan

kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan kampung proklam

- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat difokuskan pada pemberian penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat
- i. Program Pengelolaan Persampahan difokuskan pada pengelolaan sampah, pengembangan 3 R dan penanganan kebersihan kabupaten

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk difokuskan pada pelayanan e KTP, KK dan KIA.
- b. Program Pencatatan Sipil difokuskan pada pelayanan akta nikah, akta cerai, akta kelahiran dan akta kematian.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan difokuskan pada penyediaan dan pengelolaan pemanfaatan data kependudukan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan difokuskan pada penyusunan profil kependudukan berdasar data yang mutakhir baik berupa dokumen maupun data digital.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa difokuskan pada fasilitasi penataan wilayah desa, kewenangan desa dan fasilitasi pembangunan sarana prasarana desa.
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa difokuskan pada fasilitasi kerjasama antar desa, kerjasama desa dengan pihak ketiga dan kerjasama dalam kawasan perdesaan.
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa difokuskan pada fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib dan penyediaan data serta layanan desa secara digital.
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat difokuskan pada pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM).

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk difokuskan pada penyusunan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) difokuskan pada pelayanan keluarga berencana
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga

9. Perhubungan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada keselamatan angkutan dan pelayanan angkutan
- b. Program Pengelolaan Pelayaran difokuskan pada persiapan pembangunan pelabuhan pengumpan

10. Komunikasi dan informatika:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik difokuskan pada pelayanan informasi publik
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika difokuskan pada peningkatan smart city

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam difokuskan pada pembinaan simpan pinjam
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi difokuskan pada pengawasan dan pemeriksaan
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi difokuskan penilaian kesehatan koperasi
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi difokuskan peningkatan kapasitas koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro
- g. Program Pengembangan UMKM difokuskan pada pengembangan Usaha mikro menjadi usaha kecil

12. Penanaman modal:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan investasi dan iklim penanaman modal
- b. Program Promosi Penanaman Modal difokuskan pada peningkatan promosi
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal difokuskan pada pelayanan penanaman modal yang mudah
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal difokuskan pada pengendalian penanaman modal
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam penyediaan data investasi

13. Kepemudaan dan Olahraga:

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan difokuskan pada pembinaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan difokuskan pada pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga



- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan difokuskan pada pemberdayaan kepramukaan

14. Statistik:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program Pengembangan Statistik Sektoral.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi.

16. Kebudayaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan difokuskan pada pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional serta pembinaan SDM kebudayaan dan kesenian tradisional.
- b. Program pembinaan sejarah difokuskan pada pemberdayaan SDM sejarah dan peningkatan akses informasi sejarah.
- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya difokuskan pada penetapan dan pengelolaan cagar budaya.

17. Perpustakaan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan gemar membaca masyarakat.
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno difokuskan pada pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara.

18. Kearsipan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip difokuskan pada peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis serta pengelolaan arsip secara digital sehingga dapat digunakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip difokuskan pada pemusnahan, perlindungan, penyelamatan, autentikasi dan alih media arsip sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip difokuskan pada pelayanan ijin penggunaan arsip tertutup.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan pada peningkatan produksi perikanan tangkap
- b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya difokuskan pada peningkatan produksi budidaya
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan difokuskan pada pengawasan penanganan hasil laut dan perikanan



- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan difokuskan pada pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan

2. Pariwisata:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata difokuskan pada pengembangan daya tarik dan destinasi wisata dan pengelolaan pokdarwis dalam mendukung Desa Wisata, pengembangan dan penataan pariwisata dimasa pandemi COVID
- b. Program Pemasaran pariwisata difokuskan pada pemasaran wisata untuk wisatawan nusantara
- c. Program pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI difokuskan pada perlindungan atas hak kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif
- d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif difokuskan pada pengembangan jejaring pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Pertanian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian difokuskan pada penyediaan benih, bibit pertanian peternakan, penyediaan pupuk dan alsintan untuk mendukung produksi
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian difokuskan pada penyediaan lahan berkelanjutan, ketercukupan air dan akses yang baik
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan, peningkatan kualitas RPH
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian difokuskan pada pencegahan terjadinya bencana pertanian
- e. Program Perijinan Usaha Pertanian difokuskan pada peningkatan usaha pertanian yang memiliki ijin
- f. Program Penyuluhan Pertanian difokuskan pada pemberdayaan petani dan kelompok tani

4. Perdagangan:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perijinan dan Paendaftaran Perusahaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan difokuskan pada penyediaan pasar yang sesuai standar
- c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting difokuskan pada pengawasan dalam stabilitas harga barang
- d. Program Pengembangan Ekspor difokuskan pada peningkatan pemasaran produk kualitas ekspor
- e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen difokuskan pada peningkatan UTTP yang ditera dan teraulang
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri difokuskan pada penggunaan produk dalam negeri

5. Perindustrian:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri mendukung konsep KOIN
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. diusulkan mendapatkan izin usaha Industri (IUI) difokuskan pada peningkatan rekomendasi izin usaha industri
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional difokuskan pada pengembangan peningkatan kualitas data isian SIINAS

6. Transmigrasi:

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pembangunan Kawasan Transimigrasi difokuskan pada penyiapan calon transmigran dan kerjasama dengan daerah penerima transmigran

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Program Perekonomian Dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota difokuskan pada penyediaan layanan kepada DPRD berupa layanan keuangan, kesejahteraan dan administrasi.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD difokuskan pada peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik berupa tugas fungsi pokok maupun tugas fungsi lainnya.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah difokuskan pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah, kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah difokuskan pada koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah, serta peningkatan sinergitas antar dokumen perencanaan.

2. Keuangan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan BMD.

- c. Program pengelolaan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program kepegawaian Daerah.

4. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

- Program penelitian dan pengembangan daerah difokuskan pada penyusunan kajian yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi.

F. Unsur Pengawasan

• Unsur Pengawasan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada peningkatan kualitas pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan dengan tujuan tertentu serta peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi difokuskan pada peningkatan pengendalian intern dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah yang membutuhkan.

G. Unsur Kewilayahan

• Kewilayahan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penyediaan data dan informasi publik, penanganan pengaduan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan difokuskan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum difokuskan pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa dan kecamatan.
- d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada penanganan potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan serta peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa difokuskan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.



H. Unsur Pemerintahan umum

• Kesbangpol

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik.
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan difokuskan pada peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial.
- d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kewaspadaan dan deteksi dini potensi konflik.
- e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Selanjutnya rincian indikator dan pendanaan program selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

- a. Tabel 7.2. Indikator Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.
- b. Tabel 7.2.a. Indikator Rencana Program Penunjang Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.
- c. Tabel 7.2.b. Indikator Rencana Program Prioritas dan Penunjang Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.
- d. Tabel 7.2.c. Perbandingan Kapasitas Riil Anggaran dengan Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026.

Plafon anggaran dalam tabel diatas bersifat indikatif, realisasi akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran riil yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD akan dituangkan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), yang selanjutnya akan dimatangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Upaya menutup defisit pembiayaan sesuai tabel diatas secara teknis akan diusahakan melalui:

- a. Pengajuan anggaran sektoral APBN dan APBD Provinsi.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR).
- c. Swadaya masyarakat.
- d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- e. Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
- f. Rasionalisasi anggaran.



Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	KAPASITAS RIL KEUANGAN	2.448.328.954.562	2.509.954.151.000	2.598.246.406.000	2.610.622.139.000	2.627.602.779.000	2.646.312.476.000	2.667.992.412.000	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	328.333.366.498	256.170.942.000	345.977.297.000	358.353.030.000	375.333.670.000	394.043.367.000	415.723.303.000	
a	Pajak Daerah	80.569.759.532	70.600.000.000	83.252.071.000	87.241.200.000	91.257.400.000	96.455.725.000	103.485.914.000	
b	Retribusi Daerah	31.386.762.911	32.920.727.000	36.216.581.000	38.008.422.000	40.967.255.000	43.195.416.000	45.655.309.000	
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.371.187.915	13.181.115.000	23.970.490.000	26.049.198.000	28.914.675.000	31.740.494.000	34.662.422.000	
d	Lain-lain PAD yang Sah	195.005.656.140	139.469.100.000	202.538.155.000	207.054.210.000	214.194.340.000	222.651.732.000	231.919.658.000	
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.957.807.388.064	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	2.090.080.909.000	
a	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.816.252.594.531	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	1.914.625.509.000	
(1)	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	34.286.816.480	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000	29.245.189.000	
(2)	Dana Alokasi Umum	1.118.791.154.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	1.107.792.827.000	
(3)	Dana Alokasi Khusus	325.279.262.051	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000	421.676.494.000	
(4)	Alokasi Dana Desa	327.255.484.000	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000	328.015.879.000	
(5)	Dana Insentif Daerah	10.639.878.000	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000	27.895.120.000	
(6)	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	
b	Pendapatan transfer pemerintah daerah	141.554.793.533	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000	175.455.400.000	
(1)	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	131.194.217.715	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000	157.252.400.000	
(2)	Baruitan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.360.575.818	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000	18.203.000.000	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.188.200.000	163.702.300.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	
a.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi								
		2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
b.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	162.188.200.000	163.702.300.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000	162.188.200.000
B	BELANJA DAERAH	2.664.296.658.725	2.798.606.871.000	2.724.256.887.000	2.756.561.315.000	2.855.175.408.000	2.856.207.278.000	2.900.392.588.000				
1	BELANJA OPERASI	1.796.611.175.204	1.974.443.904.926	1.842.375.259.000	1.930.564.789.000	2.024.441.878.000	1.867.426.657.000	1.901.301.016.000				
a.	Belanja Pegawai	1.129.022.379.192	1.173.097.050.150	1.181.241.113.000	1.189.441.716.000	1.197.699.251.000	1.206.014.112.000	1.214.386.698.000				
b.	Belanja Barang	552.336.992.012	669.633.597.052	529.784.146.000	609.773.073.000	625.462.627.000	529.887.545.000	555.389.318.000				
c.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0	0				
d.	Belanja Subsidi	0	0	350.000.000	350.000.000	280.000.000	525.000.000	525.000.000				
e.	Belanja Hibah	111.212.329.000	115.134.616.724	115.000.000.000	115.000.000.000	185.000.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000				
f.	Belanja Bantuan Sosial	4.039.475.000	16.578.641.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000				
2	BELANJA MODAL	342.593.987.691	299.239.826.074	366.212.985.000	290.496.755.000	283.509.930.000	437.227.694.000	381.240.609.000				
a.	Belanja Tanah	547.159.229	14.163.600.000	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000				
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	66.655.036.324	92.401.486.115	9.173.894.000	13.512.556.000	12.545.607.000	40.439.201.000	131.970.930.000				
c.	Belanja Bangunan dan Gedung	222.354.769.440	104.810.717.862	58.725.227.000	31.882.154.000	31.775.584.000	319.461.483.000	169.433.616.000				
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.026.519.797	73.281.863.999	277.093.000.000	232.058.321.000	224.117.306.000	50.000.000.000	50.000.000.000				
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	20.291.661.621	14.582.158.098	6.220.864.000	8.043.724.000	10.071.433.000	22.327.010.000	24.836.063.000				
f.	Belanja Aset Lainnya	718.841.280	-	0	0	0	0	0				
3	BELANJA TAK TERDUGA	44.928.357.830	20.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000				
a.	Belanja Tak Terduga	44.928.357.830	20.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000				
4	BELANJA TRANSFER	480.163.138.000	504.923.140.000	510.668.643.000	531.499.771.000	543.223.600.000	547.552.927.000	613.850.963.000				
a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	10.261.739.000	10.352.073.000	11.974.200.000	12.562.300.000	13.358.300.000	14.192.400.000	15.299.600.000				
(1)	Bagi Hasil Pajak Daerah	7.152.180.000	10.352.073.000	11.974.200.000	12.562.300.000	13.358.300.000	14.192.400.000	15.299.600.000				
(2)	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.109.559.000	-	0	0	0	0	0				
b.	Transfer Bantuan Keuangan	469.901.399.000	494.571.067.000	498.694.443.000	518.937.471.000	529.865.300.000	533.360.527.000	598.551.363.000				



No	Uraian	Realisasi	Proyeksi						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	0	-	0	0	0	0	0	0
(2)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	468.967.484.000	494.571.067.000	498.694.443.000	518.937.471.000	529.865.300.000	533.360.527.000	598.551.363.000	
(3)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	933.915.000	-	0	0	0	0	0	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	-215.967.704.163	-288.652.720.000	-126.010.481.000	-145.939.176.000	-227.572.629.000	-209.894.802.000	-232.400.176.000	
C	PEMBIAYAAN DAERAH								
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	347.908.816.058	306.652.720.000	166.010.481.000	185.939.176.000	247.572.629.000	229.894.802.000	252.400.176.000	
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	347.906.316.058	306.652.720.000	166.010.481.000	185.939.176.000	207.572.629.000	229.894.802.000	252.400.176.000	
b	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	40.000.000.000	0	0	
c	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	
d	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	
e	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000	0	0	0	0	0	0	
f	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000	18.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0	0	

No	Uraian	Proyeksi									
		Realisasi		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
c	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pembiayaan Neto (selisih pembiayaan)	339.908.816.058	288.652.720.000	126.010.481.000	145.939.176.000	227.572.629.000	209.894.802.000	232.400.176.000			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	123.941.111.895									

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026

No. Pok. Ur. /BU /P.	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
	KABUPATEN PEMALANG					1.553.355.145.435	1.612.674.590.000	1.644.979.018.000	1.743.593.111.000	1.735.355.137.000	1.762.427.864.000	1.762.427.864.000	1.762.427.864.000	1.762.427.864.000	1.762.427.864.000	1.762.427.864.000			
	Urusan Wajib Berikatan dengan Pelayanan Dasar					810.625.626.750	957.867.224.000	961.270.000.000	995.090.000.000	995.793.990.000	1.020.031.979.000	1.020.031.979.000	1.020.031.979.000	1.020.031.979.000	1.020.031.979.000	1.020.031.979.000			
	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					263.462.548.000	273.463.000.000	273.485.000.000	273.510.000.000	273.535.000.000	273.560.000.000	273.560.000.000	273.560.000.000	273.560.000.000	273.560.000.000	273.560.000.000		Dindikbud	
01	DINAS PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEMUDAAN	Perentase terakadanya pendididkan SD, SMP, PAUD, Nonformal/ Keacetaraan Pn	%	100	100	262.744.548.000	271.470.000.000	271.890.000.000	271.910.000.000	271.930.000.000	271.950.000.000	271.950.000.000	271.950.000.000	271.950.000.000	271.950.000.000	271.950.000.000			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	55	100		30.910.000.000	30.935.000.000	30.940.000.000	30.940.000.000	30.945.000.000	30.950.000.000	30.950.000.000	30.950.000.000	30.950.000.000	30.950.000.000	30.950.000.000		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98	100		145.080.000.000	145.085.000.000	145.090.000.000	145.095.000.000	145.095.000.000	145.100.000.000	145.100.000.000	145.100.000.000	145.100.000.000	145.100.000.000	145.100.000.000		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83	100		80.000.000.000	80.005.000.000	80.010.000.000	80.010.000.000	80.015.000.000	80.020.000.000	80.020.000.000	80.020.000.000	80.020.000.000	80.020.000.000	80.020.000.000		
		Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	50	100		15.460.000.000	15.465.000.000	15.470.000.000	15.470.000.000	15.475.000.000	15.480.000.000	15.480.000.000	15.480.000.000	15.480.000.000	15.480.000.000	15.480.000.000		
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Perentase Pengembangan kurikulum yg dilaksanakan Pn	%	100	100	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000			
		Perentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal	%	100	100														
01	PROGRAM PENDIRIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Perentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfaalitasi	%	100	100	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000			
		Perentase pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikat	%	100	100														
						8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000	8.222.864.000		
	URUSAN KESEHATAN					306.277.325.250	314.504.159.000	314.510.000.000	314.525.000.000	314.545.000.000	314.565.000.000	314.565.000.000	314.565.000.000	314.565.000.000	314.565.000.000	314.565.000.000		Dinkes	
02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN POKOK DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tangguh RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	0,75	0,75	304.263.167.133	312.490.000.000	312.495.000.000	312.500.000.000	312.505.000.000	312.510.000.000	312.510.000.000	312.510.000.000	312.510.000.000	312.510.000.000	312.510.000.000			
		Perentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama)	%	50	40														
		Perentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,56	100														
		Perentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	98,4	100														



No. Rekr Ur. BU / Pr	URUSAN/ OPI/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Korupsi Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penaung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Presentase bayi baru lahir mendapat pelayanan keehatan bayi baru lahir	%	99,58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan pelayanan keehatan balia sesuai standar	%	68,44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	23,24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase orang usia 15 - 29 tahun yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	36,81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase warga negara usia > 60 tahun yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	34,93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	13,35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	32,73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase penderita JDC yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	61,67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase penderita TBC yang mendapat pelayanan keehatan sesuai standar	%	29,79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Presentase orang dengan enako terinfeksi HIV mendapat pelyanan deeku diri HIV sesuai standar	%	30,87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1 02	PROGRAM PENUNJATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga keehatan per seratus ribu penduduk	Rasio	194,23	195	386.900.000	196	386.900.000	197	387.000.000	198	390.000.000	199	395.000.000	200	400.000.000	199	400.000.000		
1 02	PROGRAM SEDJAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN KESEHATAN	Presentase sarana kefarmasian alkes dan PIRT yang memenuhi standar	%	Na	75	477.345.617	76	477.346.000	77	478.000.000	78	480.000.000	78	485.000.000	80	490.000.000	78	490.000.000		
1 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Srago Aktif	100	100	1.149.912.500	100	1.149.913.000	100	1.150.000.000	100	1.155.000.000	100	1.160.000.000	100	1.165.000.000	100	1.165.000.000	100	1.165.000.000	
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					168.736.817.000		315.100.000.000		318.600.000.000		350.310.000.000		352.888.990.000		367.461.979.000		367.461.979.000	DPU-TR	
1 03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program pengalaaan sumber daya air (ada kondisi baik	%	68	68	17.182.343.000	68	20.000.000.000	68	23.000.000.000	68	24.195.000.000	68	24.487.931.000	68	25.000.000.000	68	25.000.000.000		
		Rasio luas kawasan perumahan rawan banjir yang terlindung oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	5	6		7		7		9	9	9	9	11	11	11	11		

No. Rekr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Situasi	Kondisi Ninyas Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai (awan abrasi, erosi, dan akses yang terlindungi oleh infrastruktur pemukiman pantai di MS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	
		Rasio luas daerah urgensi kewenangan Kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73	67	68	69	70	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
1	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	%	86,2	87	88	89	90	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	15.015.000.000
		Perentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	86,2	87	88	89	90	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92	
1	03	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional standar	%	19,28	19,28	20,62	21,67	22,72	23,76	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	11.015.000.000
1	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%	92,69	91,7	93	94	95	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	2.015.000.000
		Perentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,69	91,7	93	94	95	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	
1	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	71,12	72	74	76	78	80	82	82	82	82	82	82	82	82	82	15.000.000.000
		Perentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	71,12	72	74	76	78	80	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
1	03	Program pemataan bangunan gedung	%	60	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	136.276.979.000
		Perentase bangunan gedung peruntak daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan	%	60	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
1	03	Program pemataan bangunan dan lingkungannya	%	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10.020.000.000
		Perentase Kesesuaian Bangunan dan Lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan Tata Bangunan	%	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
1	03	Program penyediaan jalan	km	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	150.000.000.000
		Rasio Kepadatan IMB kab/ kota	%	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
1	03	Program pengembangan jasa konstruksi	%	68,66	63,65	66,64	69,53	75,52	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	1.510.000.000
		Perentase Panjang Jalan kabupaten/kota Kondisi mantap	km	68,66	63,65	66,64	69,53	75,52	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	75,41	
1	03	Program pengembangan jasa konstruksi	%	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.510.000.000
		Perentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		Rasio tenaga operator / teknis / analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,35	0,64	0,94	1,23	1,52	1,82	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan penguasaannya tanpa Serentetan Konstruksi	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



No. Rekr Ur. BUD	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kurensi Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penerimaan Jenjang	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1 03	Program penyelenggaraan pertemuan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	100	100	500.000.000	100	600.000.000	1.000.000.000	1.000	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.610.000.000	100	1.610.000.000			
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMUKAN					47.569.026.000		30.786.505.000	30.810.000.000		30.835.000.000		30.860.000.000		40.445.000.000		40.445.000.000	DISPERSIFROM		
1 04 02	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMUKAN	Program pengembangan perumahan	%	100	100	673.000.000	100	1.000.000.000	1.000.000.000	100	1.010.000.000	100	1.015.000.000	100	1.020.000.000	100	1.020.000.000	40.445.000.000		
		Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	%	100	100		100	30.835.000.000	30.810.000.000	100	30.835.000.000	100	30.860.000.000	100	40.445.000.000	100	40.445.000.000			
		Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	100	100		100			100										
		Keaktifan penyelesaian rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemertintah kabupaten / kota	%	100	100		100			100										
1 04 03	Program kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	%	1,63	1,53	37.502.026.000	1,14	20.400.000.000	20.410.000.000	1,09	20.420.000.000	0,85	20.430.000.000	0,61	30.000.000.000	0,36	30.000.000.000			
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	36,88	4,5		55,0			65,0		75,0		85,0	95,0	98,0				
1 04 04	Program perumahan dan permukiman kumuh	Persentase RTLH yang tertangani	%	21,67	25	467.000.000	29	4.500.000.000	4.505.000.000	33	4.510.000.000	37	4.515.000.000	41	4.520.000.000	45	4.520.000.000			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	78,33	75		71,00			67,00		63,00		59,00	55,00	55,00				
1 04 05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (pasu)	Persentase Kelengkapan PSU pada Kawasan Permukiman/ Perumahan	%	Na	30	8.827.000.000	33	4.886.505.000	4.890.000.000	36	4.895.000.000	39	4.900.000.000	42	4.905.000.000	45	4.905.000.000			
	URUSAN KETERANGAN DAN KETERTIBAN ULMU SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.325.000.000		8.325.000.000	8.345.000.000		8.365.000.000		8.385.000.000		8.405.000.000		8.405.000.000	Satpol PP & BPPD		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					3.325.000.000		3.325.000.000	3.335.000.000		3.345.000.000		3.355.000.000		3.365.000.000		3.365.000.000	Satpol PP		
1 05	PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan kerentanan dan kecenderungan umum yang dapat dicegakan	%	75	100	2.765.000.000	100	2.765.000.000	2.770.000.000	100	2.775.000.000	100	2.780.000.000	100	2.785.000.000	100	2.785.000.000			
		Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan	%	56	60		65			70		75		80	85	85				
1 05	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	65,52	67,5	560.000.000	70	560.000.000	565.000.000	75	570.000.000	80	575.000.000	85	580.000.000	90	580.000.000			
		Persentase desa/keurahan tanggap kebakaran	%	0	6,76		13,51			20,27		27,03		33,79	40,55	40,55				
1 05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Kerakiban Daerah	Indeks	0,55	0,63	6.000.000.000	0,7	5.000.000.000	5.010.000.000	0,75	5.020.000.000	0,8	5.030.000.000	0,83	5.040.000.000	0,85	5.040.000.000			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					6.000.000.000		5.000.000.000	5.010.000.000		5.020.000.000		5.030.000.000		5.040.000.000		5.040.000.000	BPPD		



Ur	No Rekr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	07	PROGRAM PEMERINTAHAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Aktor Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	34,19	44	1.761.500.000	49	1.765.000.000	54	1.770.000.000	59	1.775.000.000	64	1.780.000.000	69	1.785.000.000	69	1.785.000.000
2	07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Kerenjakerjaan)	%	19,04	20	682.500.000	21,04	685.000.000	21,88	690.000.000	22,79	695.000.000	23,09	700.000.000	23,86	705.000.000	23,86	705.000.000
		URUSAN PEMBENDAHARAAN PERUMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.259.373.100		2.011.500.000		2.045.000.000		2.085.000.000		2.120.000.000		2.175.000.000		Dana Sosial KBPP
2	08	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBENDAHARAAN PEREMPUAN	Persentase AKG pada belajaya langsung AFBD	%	1,85	5,00	2.252.373.100	5,20	650.000.000	5,40	650.000.000	5,40	670.000.000	5,60	680.000.000	5,6	700.000.000	5,6	700.000.000
2	08	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPKD yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	1.014.881.100	100	815.000.000	100	820.000.000	100	825.000.000	100	825.000.000	100	830.000.000	100	830.000.000
2	08	04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan usia anak	%	5,32	5,32	145.000.000	5,00	141.500.000	4,75	150.000.000	4,50	150.000.000	4,25	160.000.000	4,00	175.000.000	4,00	175.000.000
2	08	05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%	74,07	74,07	55.000.000	77,70	75.000.000	81,48	80.000.000	85,18	85.000.000	88,88	90.000.000	92,59	95.000.000	92,59	95.000.000
2	08	06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	22,5	14,14	148.825.000	20,22	160.000.000	27,03	170.000.000	33,33	175.000.000	39,64	180.000.000	45,95	185.000.000	45,95	185.000.000
2	08	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak merdeka/beredukasi khusus yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	151.175.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	100	185.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000
		URUSAN PANGAN					2.008.300.000		2.013.750.000		2.025.000.000		2.045.000.000		2.070.000.000		2.090.000.000		Dupretan
2	09	02 PROGRAM PENGALIHAN sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase lumbung pangan yang aktif	%	16	18,46	166.650.000	20,72	166.750.000	22,97	170.000.000	25,22	170.000.000	27,47	175.000.000	29,72	175.000.000	29,72	175.000.000
2	09	03 PROGRAM penguatan diversifikasi dan keragaman pangan masyarakat	Jumlah keresedhaan cadangan pangan	ton	50	10,00	1.715.272.500	20,00	1.720.000.000	20,00	1.725.000.000	20,00	1.730.000.000	20,00	1.735.000.000	20,00	1.740.000.000	20	1.740.000.000
2	09	04 Program penguatan keragaman pangan	Persentase pemenuhan desa rawan pangan	%	12	12	47.562.500	12	48.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000
2	09	05 Program penguatan kemandirian pangan	Persentase pangan segar yang aman.	%	80	80	78.815.000	80	79.000.000	80	80.000.000	80	85.000.000	80	90.000.000	80	95.000.000	80	95.000.000
		URUSAN PERTANAHAN					320.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000		350.000.000		360.000.000		Dupretan
2	10	02 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah melalui media	%	60	60	120.000.000	60	120.000.000	60	130.000.000	60	140.000.000	60	145.000.000	60	150.000.000	60	150.000.000
2	10	03 PROGRAM PENYATAAN TANAH	Persentase pemenuhan tanah yang sesuai dengan peruntukan	%	80	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	205.000.000	80	210.000.000	80	210.000.000



No. Rekr Ur. BU Pr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tersedianya Tanah Gbyeck Landreform (TG) yang siap direstruksikan yang berasal dari Tanah Kebalian Makenum dan Tanah Absentee	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
		Badang tanah yang bersertifikat	%	58,08	61,07	64	67	70	73	76	76	76	76	76	76	76	76		
		URUSAN LINGKUNGAN																	
		DINAS LINGKUNGAN																	
2 11	Program pemantauan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	685.000.000	
2 11	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.455.000.000	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	68,58	68,92	69,07	69,37	69,52	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67	69,67		
		Indeks Kualitas Air	nilai	47,33	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83		
		Indeks Kualitas Udara	nilai	85,62	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58	89,58		
		Indeks Tutupan Lahar	nilai	73,56	70,03	70,08	70,12	70,16	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2		
2 11	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Pengelolaan Kehati (%)	%	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	350.000.000	
		Persentase Pengendalian B3 & LBB (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	140.000.000	
2 11	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	270.000.000	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	27	27	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
2 11	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kesatuan lokal dan hak MHA terkait PPLH	Persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kesatuan lokal dan hak MHA terkait PPLH	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	430.000.000	
2 11	Program peningkatan pendidikan, pelatihan, keterampilan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	430.000.000	
2 11	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Penghargaan yang diberikan (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	215.000.000	

No. Rekr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2 11	Program pemangangan lingkungan hidup	Persentase Pemangangan Pergerakan Masyarakat (%)	%	100	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
2 11	Program pengabdian persampahan	Persentase sampah yang terangkut (%)	%	80	81	10.075.000.000	82	9.325.000.000	83	11.000.000.000	84	11.100.000.000	85	11.200.000.000	85	11.300.000.000		
		Terselenggaranya pelaksanaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	74,97	75	1.000.000.000	75		76		76		77,00		77			
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.546.928.000		2.985.856.000		3.010.000.000		3.120.000.000		3.235.000.000		3.255.000.000		DISEDIAKANTU
2 12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.546.928.000		2.985.856.000		3.010.000.000		3.120.000.000		3.235.000.000		3.255.000.000		
2 12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepraktisan dokumen kependudukan	%	73,11	74,44	2.238.443.000	76,13	1.787.371.000	77,82	1.800.000.000	79,5	1.900.000.000	81,19	2.000.000.000	82,88	2.005.000.000		
2 12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepraktisan dokumen pencatatan sipil	%	88,98	98,13	535.627.000	98,25	505.627.000	98,38	510.000.000	98,5	515.000.000	98,63	520.000.000	98,75	525.000.000		
2 12	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase OPD yang telah memantapkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	10,26	25,64	725.358.000	41,03	645.358.000	56,41	650.000.000	71,79	655.000.000	87,18	660.000.000	100	665.000.000		
2 12	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang mutakhir	%	98,85	92	47.500.000	93	47.500.000	94	50.000.000	95	50.000.000	96	55.000.000	97	60.000.000		
	URUSAN PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.052.649.928		5.607.255.000		5.665.000.000		5.670.000.000		5.700.000.000		5.725.000.000		Dinpermasdes
2 13	DINAS PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6.052.649.928		5.607.255.000		5.665.000.000		5.670.000.000		5.700.000.000		5.725.000.000		Dewi, Dedi, Dedi
2 13	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa tertata	%	0,47	2,37	700.630.850	11,79	700.640.000	18,87	750.000.000	23,58	750.000.000	35,38	760.000.000	50,47	770.000.000		
2 13	PROGRAM PENGHATAN KERUSAKA DESA	Persentase desa yang meningkat PADes nya dan hasil kerjasama desa	%	36,49	37,44	345.158.200	46,45	350.000.000	61,14	350.000.000	63,98	350.000.000	72,04	360.000.000	77,73	365.000.000		
2 13	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	%	0	2,37	3.665.186.850	11,79	3.265.000.000	18,87	3.270.000.000	23,58	3.275.000.000	35,38	3.280.000.000	50,47	3.285.000.000		
2 13	PROGRAM PEMBIDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya	%	15,01	18,09	1.341.674.028	23,33	1.291.615.000	28,73	1.295.000.000	34,83	1.295.000.000	41,33	1.300.000.000	48,59	1.305.000.000		
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					11.529.981.000		11.530.000.000		11.545.000.000		11.560.000.000		11.575.000.000		11.590.000.000		Dinas Sosial KBPP
2 14	DINAS SOSIAL KBPP					11.529.981.000		11.530.000.000		11.545.000.000		11.560.000.000		11.575.000.000		11.590.000.000		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur yang memiliki usia dibawah 20 tahun	%	35	35,00	948.048.300	35,00	2.330.000.000	34,00	2.335.000.000	34,00	2.340.000.000	33,00	2.345.000.000	33	2.350.000.000		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (KB)	%	20,59	22,48	9.481.750.400	22,50	8.000.000.000	23,00	8.005.000.000	23,30	8.010.000.000	23,50	8.015.000.000	24	8.020.000.000		
2 14 04	PROGRAM PEMBIDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS yang ter KB yang dibesdayakan	%	85,64	85,94	1.100.182.300	85,74	1.200.000.000	85,84	1.205.000.000	85,94	1.210.000.000	86,04	1.215.000.000	86,14	1.220.000.000		
	URUSAN PERHUBUNGAN					8.366.555.410		7.467.119.000		7.500.000.000		17.500.000.000		12.550.000.000		8.765.000.000		Datubab
2 14 05	DINAS PERHUBUNGAN					8.366.555.410		7.467.119.000		7.500.000.000		17.500.000.000		12.550.000.000		8.765.000.000		
	PROGRAM PENYELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas	%	50	60	8.126.555.410	70	6.967.119.000	75	7.000.000.000	80	17.000.000.000	85	12.000.000.000	90	8.210.000.000		



No. Rekr Ur. RU Pr.	URUSAN/ OPI/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD Rp.	OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2 17	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM di rumah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi perusahaan UMKM YB di rumah	%	34,16	33,66	2.290.000.000	1.51	2.295.000.000	1,53	2.300.000.000	1,55	2.305.000.000	1,57	2.310.000.000	1,58	2.315.000.000	2.315.000.000	
	URUSAN PENANAMAN MODAL					1.376.769.850		1.491.710.000		6.891.739.000		4.905.000.000		1.990.000.000		1.990.000.000	1.990.000.000	DPM-PTSP
2 18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PRU	Perencanaan dan pelaksanaan program penanaman modal	%	35,83	2,95	200.651.000	3,00	200.651.000	3,05	200.000.000	3,10	205.000.000	3,15	210.000.000	3,20	215.000.000	215.000.000	Kem
2 18	Program promosi penanaman modal	Perentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	%	100	100	152.000.000	100	212.000.000	100	212.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	220.000.000	220.000.000	
2 18	Program pelayanan penanaman modal	Perentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	90,51	1,00		2,00		3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
2 18	Program pelayanan penanaman modal	Perentase pelayanan Pelayanan Prujinan dan Non Prujinan Penanaman Modal	%	98	95	54.379.850	95	599.320.000	96	6.000.000.000	96	4.000.000.000	97	1.020.000.000	97	1.040.000.000	1.040.000.000	
2 18	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	perentase pelaku usaha yang memberikan laporan dan kegiatan tepat waktu	%	27,61	40,00	457.462.000	42,00	452.462.000	44,00	452.462.000	46,00	455.000.000	48,00	460.000.000	50,00	465.000.000	465.000.000	
2 18	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Perentase realisasi perijinan	%	157,30	100,00	27.277.000	100,00	27.277.000	100,00	27.277.000	100,00	30.000.000	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	40.000.000	
	URUSAN KEPERLUAN DAN OLARAH					7.670.000.000		7.678.000.000		7.689.000.000		7.700.000.000		7.711.000.000		7.722.000.000	7.722.000.000	Danpaupera
2 19	DINAS PARIBATA, KEPERLUAN, OLAH RAGA	Perentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	60,87	65,22	1.053.200.000	69,57	1.055.000.000	73,91	1.058.000.000	78,26	1.061.000.000	82,61	1.064.000.000	86,96	1.067.000.000	1.067.000.000	
2 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPERLUAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,05	0,02		0,04		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	
2 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	28,08	29,04	30.01	30,01		30,98	31,95	32,92	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	33,88	
2 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perentase prestasi olahraga	%	47,83	Na	6.316.800.000	42,85	6.320.000.000	50,00	6.325.000.000	33,33	6.330.000.000	25,00	6.335.000.000	20,00	6.340.000.000	6.340.000.000	
2 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perentase prestasi olahraga	Medali	0	7		10		15	20	25	25	25	30	30	30	30	
2 19	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Perentase anggota Pramuka yang dihima	%	3,57	17,86	300.000.000	32,14	303.000.000	50,00	306.000.000	67,86	309.000.000	85,71	312.000.000	100,00	315.000.000	315.000.000	
	URUSAN STATISTIK					349.796.000		350.000.000		355.000.000		360.000.000		365.000.000		370.000.000	370.000.000	Dikomisinfo
2 19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%	2	15	349.796.000	20	350.000.000	30	355.000.000	40	360.000.000	50	365.000.000	60	370.000.000	370.000.000	
2 19	PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Perentase Organisasi yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	



No. Rekr	URUSAN / OPD / PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 26	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	0	100	8.970.000.000	100	13.091.086.000	19.270.000.000	18.000.000.000	18.059.653.000	13.295.000.000	13.295.000.000	16.310.000.000	16.310.000.000	16.310.000.000	16.310.000.000	16.310.000.000	Dwani
		Perentase pertumbuhan jumlah wisatawan, manor-onggora per kebangsaan	%	0	0	8.970.000.000	0	11.831.086.000	18.000.000.000	18.000.000.000	16.769.653.000	13.295.000.000	13.295.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	
		Perentase peningkatan persentase wisatawan musafir yang datang ke kabupaten/kota	%	(28,84)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Tingkat hunian akomodasi	%	24,17	25,38	0	26,65	0	26,65	29,32	0	32,25	0	39,02	39,02	39,02	39,02	39,02	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,40	0,48	0	0,50	0	0,53	0,53	0	0,60	0,66	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
		Jumlah PAD retribusi pariwisata	Milyar Rp	1,26	1,50	0	1,55	0	1,71	1,71	0	1,88	2,06	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	
3 26	Program pemaksimalan pariwisata	Perentase objek wisata yang dipromosikan	%	100	100	450.000.000	100,00	400.000.000	400.000.000	400.000.000	410.000.000	410.000.000	410.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000	
3 26	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Perentase sarana dan prasarana Ekraf yang dimanfaatkan	%	20	20	60.000.000	40	60.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	
3 26	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Perentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	32	74,5	930.000.000	82	800.000.000	800.000.000	800.000.000	810.000.000	810.000.000	810.000.000	815.000.000	815.000.000	815.000.000	815.000.000	815.000.000	
	URUSAN PERTANIAN					18.290.669.000		15.069.126.000	15.085.000.000	15.085.000.000	15.100.000.000	15.115.000.000	15.115.000.000	15.140.000.000	15.140.000.000	15.140.000.000	15.140.000.000	Diperlukan	
3 27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perentase Sarana Pertanian sesuai kebutuhan (bobot, pupuk, Alatirai)	%	80	80	3.716.863.000	80	3.117.000.000	3.120.000.000	3.120.000.000	3.125.000.000	3.130.000.000	3.130.000.000	3.135.000.000	3.135.000.000	3.135.000.000	3.135.000.000	3.135.000.000	
3 27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	20	20	9.998.050.000	25	7.867.126.000	7.820.000.000	7.820.000.000	7.620.000.000	7.625.000.000	7.625.000.000	7.630.000.000	7.630.000.000	7.630.000.000	7.630.000.000	7.630.000.000	
3 27	PROGRAM PENGENDALIAN RESEPTAN HEWAN DAN PENYAKIT BENCANA PERTANIAN DAN PENYAKIT BENCANA PERTANIAN	Perentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus penyakit hewan menular	%	10,30	10,31	660.600.000	10,32	665.000.000	670.000.000	670.000.000	675.000.000	675.000.000	675.000.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	680.000.000	
3 27	PROGRAM PENGENDALIAN RESEPTAN HEWAN DAN PENYAKIT BENCANA PERTANIAN DAN PENYAKIT BENCANA PERTANIAN	Perentase faalitan penanggulangan bencana pertanian	%	7,60	20	318.907.000	20	320.000.000	320.000.000	320.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	
3 27	PROGRAM PERJULIHAN USAHA PERTANIAN	Perentase jumlah u ulian usaha pertanian	%	100,00	NA	0	NA	0	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
3 27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Perentase kelompok tani aktif	%	5	5,00	3.596.249.000	5,00	3.100.000.000	3.105.000.000	3.105.000.000	3.105.000.000	3.110.000.000	3.110.000.000	3.115.000.000	3.115.000.000	3.115.000.000	3.115.000.000	3.115.000.000	
	URUSAN PERDAGANGAN					11.150.000.000		7.309.588.000	7.375.000.000	7.375.000.000	7.400.000.000	7.425.000.000	7.425.000.000	7.455.000.000	7.455.000.000	7.455.000.000	7.455.000.000	Diperlukan	
3 30	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perentase Pelaku Usaha yang diawasi perusahaannya	%	0,5	0,5	60.000.000	0,5	100.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	110.000.000	110.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	

No. Buk Ut BUI Pn	URUSAN / OPD / PROGRAM	Indikator Program	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondas Akhir RPJMD Rp	OPD Peranggung Jawab
				Kondas Awal	Targer	Kondas Awal	Targer	Kondas Awal	Targer	Kondas Awal	Targer	Kondas Awal	Targer	Kondas Awal	Targer	Kondas Awal	Targer		
		Perentase pelepasan usaha yang memenuhi kriteria (IUP/SIUP Pesisir Perikanan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	8,04	8,2														
3 30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA, DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi syarat	%	0	5,88	8.201.000.000	5,88	4.623.051.000	5,88	4.635.000.000	5,88	4.640.000.000	5,88	4.645.000.000	5,88	4.645.000.000	5,88	4.645.000.000	
3 30	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perentase stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	80	9.211.463.000	80	850.000.000	80	850.000.000	80	855.000.000	80	860.000.000	80	860.000.000	80	860.000.000	
		Perentase Kinerja realisasi pupuk	%	95	95		96		97	98	99	100	100	100	100	100	100	100	
3 30	PROGRAM PEMBANGUNAN EKSPOR	Perentase pertumbuhan nilai ekspor	%	34	25	950.000.000	25,5	850.000.000	26	900.000.000	27	905.000.000	27,5	910.000.000	27,5	910.000.000	27,5	910.000.000	
3 30	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Perentase alat ukur takar timbang dan perlengkapan (IUTP) yang ditera ulang	%	3,16	27	450.000.000	28	420.000.000	29	425.000.000	30	430.000.000	31	435.000.000	32	440.000.000	32	440.000.000	
3 30	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Perentase pelepasan usaha yang didaftarkan pemasarannya	%	0,4	0,4	599.537.000	0,5	466.537.000	0,6	470.000.000	0,7	475.000.000	0,8	480.000.000	0,8	485.000.000	0,8	485.000.000	
	URUSAN PERINDUSTRIAN					1.500.000.000		1.580.000.000		1.595.000.000		1.605.000.000		1.620.000.000		1.635.000.000		1.635.000.000	Dikopernidag
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					1.500.000.000		1.580.000.000		1.595.000.000		1.605.000.000		1.620.000.000		1.635.000.000		1.635.000.000	Kon
3 31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPJK	%	0	30	650.000.000	30	800.000.000	30	805.000.000	40	810.000.000	40	820.000.000	40	820.000.000	40	820.000.000	
		Perentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIS yang ditetapkan dalam RPJK	%	0	30		30		30		60		60		60		60		
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	0,25	2		5		6		6		6		6		6		
3 31	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Perentase industri yang mendapat fasilitas izin usaha industri (IUI)	%	100	100	250.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	100	245.000.000	100	250.000.000	100	255.000.000	100	255.000.000	
		Perentase jumlah hasil pemantauan dengan jumlah lain Usaha Kawasan Industri (UKI) dan lain Perluasan Kawasan Industri (PKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten / kota	%	100	100		100		100		100		100		100		100		
		Perentase jumlah hasil pemantauan dengan jumlah lain Perluasan Industri (PIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100		100		100		100		100		100		100		



No. Rekr Ur	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPT/ Penanggung Jawab	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
3	31	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	%	100	600.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	555.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000		
		Indikator Program: Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengujian program pengujian program (Uji Keefektifan dan Kepraktisan) Mengengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	23,8		100		100		100		100		100		100			
		Indikator Program: Tersedianya informasi indikator secara lengkap dan tekun	%	23,8		100		100		100		100		100		100			
3	32	URUSAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA KAMASAN TRANSMIGRASI	%	0	290.000.000	20	293.000.000	30	296.000.000	30	299.000.000	40	302.000.000	40	305.000.000	40	305.000.000	Dinaker	
		Indikator Program: Persentase transmigran yang ditempatkan	%	0		20		30		30		40		40		40			
		Indikator Program: Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	%		31.714.338.850		24.600.002.000		24.630.000.000		24.650.000.000		24.670.000.000		24.690.000.000		24.690.000.000		
4	01	SECRETARIAT DAERAH	%	Na	15.475.793.800	57,87	12.478.000.000	58,37	12.485.000.000	58,77	12.500.000.000	58,18	12.515.000.000	59,29	12.530.000.000	59,59	12.530.000.000	Berda	
		Indikator Program: Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Kepra yang terlaksana	%	Na		91,93		92,27		93,13		93,87		94,40		94,40			
4	01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	%	100	2.411.804.300	100	1.912.000.000	100	1.915.000.000	100	1.920.000.000	100	1.925.000.000	100	1.930.000.000	100	1.930.000.000		
		Indikator Program: Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perencanaan dan Pembangunan yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100			
4	02	SECRETARIAT DPRD	%	82,33	16.238.545.050	74,12	12.142.052.000	75,45	12.145.000.000	76,05	12.150.000.000	78,15	12.155.000.000	80,15	12.160.000.000	80,15	12.160.000.000	Ber DPRD	
		Indikator Program: Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	%	82,33		74,12		75,45		76,05		78,15		80,15		80,15			
		Indikator Program: Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	%	56,93		86,15		87,45		88,05		88,68		89,15		89,15			
		Indikator Program: Tingkat kelengkapan sarana program RPJMD dengan RPJMD	%	99,49		100		100		100		100		100		100			
5	01	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	85,71	4.103.200.000		3.415.933.000		3.590.000.000		3.850.000.000		3.970.000.000		4.090.000.000		4.090.000.000	Bagpuda	
		Indikator Program: Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah rumpun bidang perencanaan	%	85,71															
		Indikator Program: Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang	%	85,71															
5	01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	%	82,14	2.929.136.500	100	2.429.136.500	100	2.600.000.000	100	2.700.000.000	100	2.800.000.000	100	2.900.000.000	100	2.900.000.000		
		Indikator Program: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang perencanaan	%	82,14															
		Indikator Program: Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang	%	82,14															



No. Rekr Ur. BUK Pr	URUSAN / UPEU / PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Tingkat keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan perangkat IPK dan rumput lalang IPK dan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	83,33	100	539.304.287,000	475.626.245,000	489.605.530,000	543.680.708,000	544.246.397,000	546.714.355,000	546.714.355,000	546.714.355,000	546.714.355,000	546.714.355,000	546.714.355,000	546.714.355,000	546.714.355,000	
5 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perentase penyempitan raperdas APBD sesuai ketentuan	%	100	100,00	537.653.140,000	473.744.804,000	466.274.804,000	536.344.298,000	536.400.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	537.100.000,000	BPKAD
		Perentase Belanja Urusan Pemertahanan Umum	%	60	60	528.183.140,000	466.274.804,000	466.972.444,000	527.314.298,000	527.400.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	528.000.000,000	
		Perentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	%	100	100														
		Perentase penyempitan raperdas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	%	100	100														
		Per sentase persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	100														
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,12	13,14														
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-4,92	-4,91														
		Rasio Belanja Urusan Pemertahanan Umum (dikurangi transfer expenditure)	%	60	60,00														
		Opini Laporan Keuangan	%	WTP	WTP														
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,27	4,25														
5 02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perentase Pemungutan Terbit Administrasi Penatausahaan BMD	%	100,00	100,00	9.470.000.000	7.470.000.000	15.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000	9.100.000.000		
		Management Aset	%	100	100														
5 02	BAFENDA PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap total pendapatan	%	12,72	13,50	1.651.147.500	2.081.441.000	7.433.086.000	7.336.410.000	7.846.397.000	9.614.355.000	9.614.355.000	9.614.355.000	9.614.355.000	9.614.355.000	9.614.355.000	9.614.355.000		
		Perentase WP terutang terhadap data pajak daerah yang terapkan (PBB (PBB) %)	%	68,33	78,00														
		Rasio pajak daerah terhadap PAD	%	25,87	25,00														
		Perentase kebupakan pendapatan yang diselesaikan	%	100,00	100,00														
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	5														
5 03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	%	3,50	3,50	8.038.629.675	6.300.674.000	6.300.000.000	7.990.000.000	8.000.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000		
		Perentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	%	1,50	1,50	8.038.629.675	6.300.674.000	6.300.000.000	7.990.000.000	8.000.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000	8.010.000.000		
		Perentase rilaia kinerja aparatur yang devaluaasi	%	100	100														

No. Rekr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Pemangung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	74,44	26.050.000	74,14	25.000.000	74,44	28.000.000	74,44	31.000.000	74,44	34.000.000	74,44	37.000.000	74,44	37.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	91,23	79.400.000	91,23	75.000.000	94	78.000.000	96	81.000.000	96	84.000.000	97	87.000.000	97	87.000.000		
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	98	-	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000		
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	80.950.000	100	80.000.000	100	83.000.000	100	86.000.000	100	89.000.000	100	92.000.000	100	92.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	70	66.350.000	70	65.000.000	80	68.000.000	80	71.000.000	80	74.000.000	90	77.000.000	90	77.000.000		
7 01	KECAMATAN PULOGARI		%	91,44	466.998.700	91,44	479.000.000	91,44	494.000.000	91,44	509.000.000	91,44	524.000.000	91,44	539.000.000	91,44	539.000.000	Rev. Puluwari	
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	91,44	31.042.100	91,44	31.000.000	91,44	34.000.000	91,44	37.000.000	91,44	40.000.000	91,44	43.000.000	91,44	43.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	100	88.340.500	100	88.000.000	100	91.000.000	100	94.000.000	100	97.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	100	2.025.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000		
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	216.999.900	100	210.000.000	100	213.000.000	100	216.000.000	100	219.000.000	100	222.000.000	100	222.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	75	127.991.200	75	120.000.000	75	123.000.000	75	126.000.000	75	129.000.000	75	132.000.000	75	132.000.000		
7 01	KECAMATAN BELUK		%	93,33	531.151.800	93,33	540.000.000	93,33	555.000.000	93,33	570.000.000	93,33	585.000.000	93,33	600.000.000	93,33	600.000.000	Rev. Beluk	
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	93,33	95.147.800	93,33	95.000.000	93,33	98.000.000	93,33	101.000.000	93,33	104.000.000	93,33	107.000.000	93,33	107.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	100	95.200.000	100	95.000.000	100	98.000.000	100	101.000.000	100	104.000.000	100	107.000.000	100	107.000.000		
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	100	122.467.600	100	120.000.000	100	123.000.000	100	126.000.000	100	129.000.000	100	132.000.000	100	132.000.000		
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	75	218.336.400	75	200.000.000	83,33	203.000.000	83,33	206.000.000	91,67	209.000.000	91,67	212.000.000	100	212.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	93,33	60.000.000	93,33	60.000.000	93,33	63.000.000	93,33	66.000.000	93,33	69.000.000	93,33	72.000.000	93,33	72.000.000		
7 01	KECAMATAN WATUKUMPUL		%	93,33	330.824.000	93,33	340.000.000	93,33	355.000.000	93,33	370.000.000	93,33	385.000.000	93,33	400.000.000	93,33	400.000.000	Rev. Watukumpul	
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	100	83.824.000	100	80.000.000	100	83.000.000	100	86.000.000	100	89.000.000	100	92.000.000	100	92.000.000		

No. Buk. Th.	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD	OPD Peningkatang Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAHAN DAN KETERTAHAN UMUM	Perentase gangguan tumbuh tingkat desa dan kecamatan yang dapat dieliminasi	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	42.000.000	
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.000.000	100	69.000.000	100	72.000.000	72.000.000	
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	73,33	73,33	127.000.000	80	110.000.000	80	113.000.000	80,67	116.000.000	80,67	119.000.000	93,33	122.000.000	122.000.000	
7 01	KECAMATAN BODEH		%	90	90	384.945.000	90	405.000.000	90	420.000.000	90	435.000.000	90	450.000.000	90	465.000.000	465.000.000	Kec. Bodeh
7 01	PROGRAM PENYELINGGHAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase pelayanan publik yang tersedia	%	85	86	119.000.000	87	119.000.000	88	122.000.000	89	125.000.000	90	128.000.000	91	131.000.000	131.000.000	
7 01	PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perentase gangguan pertumbuhan tingkat desa dan kecamatan yang dapat dieliminasi	%	97	100	35.000.000	100	35.000.000	100	38.000.000	100	41.000.000	100	44.000.000	100	47.000.000	47.000.000	
7 01	PROGRAM PENYELINGGHAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	90.000.000	100	90.000.000	100	93.000.000	100	96.000.000	100	99.000.000	100	102.000.000	102.000.000	
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	63,16	68,42	134.850.000	73,68	120.000.000	78,95	123.000.000	78,95	126.000.000	80,47	129.000.000	85,47	132.000.000	132.000.000	
7 01	KECAMATAN BANTARBOLANG		%	92,22	92,22	41.390.000	92,22	45.000.000	92,22	48.000.000	92,22	51.000.000	92,22	54.000.000	92,22	57.000.000	57.000.000	Kec. Bantarbolang
7 01	PROGRAM PENYELINGGHAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase pelayanan publik yang tersedia	%	92,22	92,22	41.390.000	92,22	45.000.000	92,22	48.000.000	92,22	51.000.000	92,22	54.000.000	92,22	57.000.000	57.000.000	
7 01	PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perentase gangguan pertumbuhan tingkat desa dan kecamatan yang dapat dieliminasi	%	90	91	69.180.000	92	70.000.000	93	73.000.000	94	76.000.000	95	79.000.000	96	82.000.000	82.000.000	
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAHAN DAN KETERTAHAN UMUM	Perentase gangguan tumbuh tingkat desa dan kecamatan yang dapat dieliminasi	%	100	100	15.520.000	100	16.000.000	100	19.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	28.000.000	28.000.000	
7 01	PROGRAM PENYELINGGHAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	123.565.000	100	125.000.000	100	128.000.000	100	131.000.000	100	134.000.000	100	137.000.000	137.000.000	
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Perentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	88,24	88,24	83.175.000	88,24	85.000.000	88,24	88.000.000	91,12	91.000.000	91,12	94.000.000	94,12	97.000.000	97.000.000	
7 01	KECAMATAN BANDUNGHAL		%	93,33	93,33	118.137.000	93,33	118.000.000	93,33	121.000.000	93,33	124.000.000	93,33	127.000.000	93,33	130.000.000	130.000.000	Rec. Bandungsung
7 01	PROGRAM PENYELINGGHAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perentase pelayanan publik yang tersedia	%	93,33	93,33	118.137.000	93,33	118.000.000	93,33	121.000.000	93,33	124.000.000	93,33	127.000.000	93,33	130.000.000	130.000.000	
7 01	PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perentase gangguan pertumbuhan tingkat desa dan kecamatan yang dapat dieliminasi	%	100	100	91.824.000	100	92.000.000	100	95.000.000	100	98.000.000	100	101.000.000	100	104.000.000	104.000.000	
7 01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAHAN DAN KETERTAHAN UMUM	Perentase gangguan tumbuh tingkat desa dan kecamatan yang dapat dieliminasi	%	98	100	65.000.000	100	65.000.000	100	68.000.000	100	71.000.000	100	74.000.000	100	77.000.000	77.000.000	
7 01	PROGRAM PENYELINGGHAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	90.542.600	100	90.000.000	100	93.000.000	100	96.000.000	100	99.000.000	100	102.000.000	102.000.000	

No. Berk	Uz. BUKU P.	URUSAN / OFD / PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OFD Penanggung Jawab	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
7	01	PROGRAM PEMBINAAN PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	58	48,89	255.000.000	200.000.000	88,89	203.000.000	88,89	203.000.000	94,14	205.000.000	94,14	209.000.000	94,14	212.000.000	94,14	212.000.000	Kec. Pemalang
7	01	PROGRAM PEMBINAAN PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	81,11	81,11	244.830.800	240.000.000	81,11	255.000.000	81,11	260.000.000	81,11	260.000.000	81,11	265.000.000	81,11	270.000.000	81,11	270.000.000	Kec. Pemalang
7	01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	7.393.375.784	5.789.256.000	100	6.802.000.000	100	6.180.000.000	100	7.270.000.000	100	7.275.000.000	100	7.280.000.000	100	7.280.000.000	Kec. Pemalang
7	01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KERTERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketertaman tingkat desa dan kecamatan yang dapat diatasi	%	100	100	32.000.000	32.000.000	100	47.000.000	100	47.000.000	100	30.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Kec. Pemalang
7	01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	53,84	53,84	159.780.200	160.000.000	61,53	175.000.000	61,53	175.000.000	69,23	180.000.000	69,23	185.000.000	76,92	159.780.000	76,92	159.780.000	Kec. Pemalang
7	01	KECAMATAN TAMAN	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	85,56	85,56	2.393.539.886	1.962.743.000	85,56	2.185.000.000	85,56	2.255.000.000	85,56	2.255.000.000	85,56	2.375.000.000	85,56	2.445.000.000	85,56	2.445.000.000	Kec. Tamansari
7	01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	80	81	2.138.520.616	1.667.743.000	82	1.850.000.000	83	1.900.000.000	84	1.900.000.000	85	2.000.000.000	86	2.050.000.000	86	2.050.000.000	Kec. Tamansari
7	01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KERTERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketertaman tingkat desa dan kecamatan yang dapat diatasi	%	100	100	30.000.000	30.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Kec. Tamansari
7	01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	121.537.460	110.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	130.000.000	Kec. Tamansari
7	01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	10,52	15,79	109.504.670	105.000.000	21,05	110.000.000	26,32	110.000.000	31,58	115.000.000	31,58	120.000.000	42,11	125.000.000	42,11	125.000.000	Kec. Tamansari
7	01	KECAMATAN PETARUKAN	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	91,11	91,11	1.589.777.000	1.612.750.000	91,11	1.627.750.000	91,11	1.642.750.000	91,11	1.642.750.000	91,11	1.657.750.000	91,11	1.672.750.000	91,11	1.672.750.000	Kec. Petarukan
7	01	PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	100	1.124.073.000	1.120.000.000	100	1.123.000.000	100	1.126.000.000	100	1.126.000.000	100	1.129.000.000	100	1.132.000.000	100	1.132.000.000	Kec. Petarukan
7	01	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KERTERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketertaman tingkat desa dan kecamatan yang dapat diatasi	%	100	100	30.000.000	30.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	Kec. Petarukan
7	01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	100	115.354.000	115.000.000	100	118.000.000	100	118.000.000	100	121.000.000	100	124.000.000	100	127.000.000	100	127.000.000	Kec. Petarukan
7	01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	80	80	67.750.000	67.750.000	83,33	70.750.000	83,33	70.750.000	86,67	73.750.000	86,67	76.750.000	90	79.750.000	90	79.750.000	Kec. Ampelgading
7	01	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	88,89	88,89	346.335.000	370.000.000	88,89	385.000.000	88,89	36.000.000	88,89	39.000.000	88,89	41.000.000	88,89	45.000.000	88,89	45.000.000	Kec. Ampelgading

No. Rekr	URUSAN/ OHP/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
7 01	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	97	62.050.000	97	62.000.000	97	65.000.000	97	68.000.000	97	71.000.000	97	74.000.000	97	74.000.000	74	74.000.000	Rec. Ulujuani
7 01	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trambun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	95	30.000.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	133.300.000	100	130.000.000	100	133.000.000	100	136.000.000	100	139.000.000	100	142.000.000	100	142.000.000	100	142.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	75	117.705.000	81,25	115.000.000	81,25	118.000.000	87,5	121.000.000	87,5	124.000.000	87,5	127.000.000	87,5	127.000.000	87,5	127.000.000	Rec. Warungring
7 01	REKAMATAN COMAL	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	74,44	1.548.115.900	74,44	1.262.000.000	74,44	1.435.000.000	74,44	1.555.000.000	74,44	1.580.000.000	74,44	1.605.000.000	74,44	1.605.000.000	74,44	1.605.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	100	1.099.040.700	100	800.000.000	100	950.000.000	100	1.050.000.000	100	1.055.000.000	100	1.060.000.000	100	1.060.000.000	100	1.060.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trambun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	102.509.000	100	107.000.000	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	61,11	278.661.200	66,67	256.000.000	72,22	260.000.000	77,78	265.000.000	83,33	270.000.000	88,89	275.000.000	88,89	275.000.000	88,89	275.000.000	Rec. Warungring
7 01	REKAMATAN ULUJUANI	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	95,56	248.418.000	95,56	268.000.000	95,56	293.000.000	95,56	318.000.000	95,56	343.000.000	95,56	368.000.000	95,56	368.000.000	95,56	368.000.000	Rec. Ulujuani
7 01	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	82,5	49.000.000	81	46.000.000	85	51.000.000	86	56.000.000	87	61.000.000	88	66.000.000	88	66.000.000	88	66.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trambun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	93.000.000	100	83.000.000	100	88.000.000	100	93.000.000	100	98.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	100	103.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	61,11	73.900.000	66,67	70.000.000	66,67	75.000.000	72,22	80.000.000	72,22	85.000.000	77,78	90.000.000	77,78	90.000.000	77,78	90.000.000	Rec. Warungring
7 01	REKAMATAN WARUNGRING	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	74,44	401.750.000	74,44	429.000.000	74,44	444.000.000	74,44	459.000.000	74,44	474.000.000	74,44	489.000.000	74,44	489.000.000	74,44	489.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	100	67.000.000	100	67.000.000	100	70.000.000	100	73.000.000	100	76.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	100	79.000.000	Rec. Warungring
7 01	PROGRAM KOORDINASI KENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trambun tingkat desa dan kecamatan yang dapat diantisipasi	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	33.000.000	100	36.000.000	100	39.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	100	42.000.000	Rec. Warungring



No. Rekr	Urusan/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7 01	PROGRAM PENGELOMPOKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang terentangi	%	100	160.000.000	100	160.000.000	100	163.000.000	100	166.000.000	100	169.000.000	100	172.000.000	100	172.000.000		
7 01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	66,67	112.000.000	66,67	110.000.000	83,33	113.000.000	66,67	116.000.000	83,33	119.000.000	83,33	122.000.000	83,33	122.000.000		
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				6.898.508.000		6.008.332.000		6.215.000.000		6.325.000.000		6.435.000.000		6.555.000.000		6.555.000.000		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.898.508.000		6.008.332.000		6.215.000.000		6.325.000.000		6.435.000.000		6.555.000.000		6.555.000.000		Badan Kebangpoel
8 01	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan ke-akraker kebangsaan	%	75	2.075.000.000	82	500.000.000	88	500.000.000	85	505.000.000	90	505.000.000	95	510.000.000	95	510.000.000		
01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang paham politik	%	40	2.598.508.000	50	3.208.332.000	60	3.210.000.000	55	3.210.000.000	65	3.215.000.000	70	3.220.000.000	70	3.220.000.000		
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase organisasi kemasyarakatan yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan	%	50	750.000.000	70	850.000.000	80	850.000.000	80	855.000.000	80	855.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000		
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	45	225.000.000	60	400.000.000	65	600.000.000	65	700.000.000	70	800.000.000	75	900.000.000	80	900.000.000		
01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deretan dari konflik sosial	%	50	1.250.000.000	60	1.050.000.000	65	1.055.000.000	65	1.055.000.000	70	1.060.000.000	75	1.065.000.000	80	1.065.000.000		
8																			

Tabel 7.2.a Indikasi Rencana Program Penunjang Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026

No Rek Ur	BU	Pr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			KABUPATEN PEMALANG					1.245.251.725.565	1.111.582.297.000	1.111.582.297.000	1.111.582.297.000	1.111.582.297.000	1.120.852.141.330	1.120.852.141.330	1.120.852.141.330	1.137.964.724.603	1.137.964.724.603	1.137.964.724.603
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					707.125.911.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		59,48	59,50	707.125.911.000	60,00	637.126.000.000	60,50	637.126.000.000	61,00	637.126.000.000	61,50	637.126.000.000	62,00	637.126.000.000
				IRB		35,70	36,00		36,50		37,00	37,50	38,00	38,50				
			Dinas Kesehatan					105.933.883.750	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		56,04	56,50	105.933.883.750	57,00	100.934.000.000	57,50	100.934.000.000	58,00	100.934.000.000	58,50	100.934.000.000	59,00	100.934.000.000
				IRB		42,78	43,00		43,50		44,00	44,50	45,00	46,00				
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					32.559.695.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		59,77	60,00	32.559.695.000	60,25	26.900.000.000	60,50	26.900.000.000	60,75	26.900.000.000	61,00	26.900.000.000	61,25	26.900.000.000
				IRB		43,14	43,33		43,65		43,90	44,15	44,40	44,65				
			Diperkim					26.921.965.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		54,58	55,00	26.921.965.000	56,00	22.022.000.000	58,00	22.022.000.000	59,00	22.022.000.000	62,00	22.022.000.000	64,00	22.022.000.000
				IRB		62,84	64,00		66,00		68,00	70,00	72,00	74,00				
			Satuan Polisi Pamong Praja					12.307.756.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		45,23	45,33	12.307.756.000	45,43	10.471.026.000	45,53	10.471.026.000	45,63	10.471.026.000	45,73	10.471.026.000	45,83	10.471.026.000
				IRB		45,18	45,28		45,38		45,48	45,58	45,68	45,78				
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah					7.396.239.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		43,49	45,00	7.396.239.000	48,00	6.593.816.000	51,00	6.593.816.000	54,00	6.593.816.000	57,00	6.593.816.000	60,00	6.593.816.000
				IRB		42,59	45,00		48,00		51,00	54,00	57,00	60,00				
			Dinas KBPP PPPA					7.677.737.400	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		55,51	60,00	7.677.737.400	60,30	5.978.000.000	60,50	5.978.000.000	61,00	5.978.000.000	61,10	5.978.000.000	61,20	5.978.000.000



1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		42,89	44,89	3.115.062.000	46,89	2.691.513.000	48,69	2.691.513.000	50,89	2.691.513.000	52,89	3.115.062.000	54,89	3.115.062.000
			IRB		9,72	10,72		11,72		12,72		13,72		14,72		15,72	
		Kecamatan Randudongkalo					2.987.202.400		2.548.154.000		2.548.154.000		2.548.154.000		2.987.202.000		2.987.202.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		36,33	38,90	2.987.202.400	38,90	2.548.154.000	38,90	2.548.154.000	42,89	2.548.154.000	42,89	2.987.202.000	42,89	2.987.202.000
			IRB		3,39	26,28		28,02		31,05		31,05		34,52		34,52	
		Kecamatan Pemalang					15.330.960.216		13.431.000.000		13.431.000.000		13.431.000.000		15.330.960.000		15.330.960.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		35,05	37,50	15.330.960.216	38,00	13.431.000.000	38,50	13.431.000.000	39,00	13.431.000.000	39,50	15.330.960.000	40,00	15.330.960.000
			IRB		58,15	58,30		58,50		58,60		58,70		58,80		58,90	
		Kecamatan Tamanan					7.175.559.114		6.176.000.000		6.176.000.000		6.176.000.000		7.175.560.000		7.175.560.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		33,78	33,80	7.175.559.114	33,85	6.176.000.000	33,90	6.176.000.000	33,95	6.176.000.000	34,00	7.175.560.000	34,04	7.175.560.000
			IRB		30,61	31,00		31,50		31,97		32,25		33,00		33,55	
		Kecamatan Petarukan					4.708.053.000		3.743.702.000		3.743.702.000		3.743.702.000		4.708.053.000		4.708.053.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		33,75	33,75	4.708.053.000	34,00	3.743.702.000	34,50	3.743.702.000	35,00	3.743.702.000	35,00	4.708.053.000	35,00	4.708.053.000
			IRB		35,34	35,34		35,50		35,50		36,00		36,00		36,00	
		Kecamatan Ampelgading					3.366.251.000		2.887.659.000		2.887.659.000		2.887.659.000		3.366.251.000		3.366.251.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		38,38	40,00	3.366.251.000	41,00	2.887.659.000	42,00	2.887.659.000	43,00	2.887.659.000	44,00	3.366.251.000	45,00	3.366.251.000
			IRB		34,82	35,00		36,00		37,00		38,00		39,00		40,00	
		Kecamatan Comal					5.306.974.100		4.568.670.000		4.568.670.000		4.568.670.000		5.306.974.000		5.306.974.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		30,11	33,00	5.306.974.100	35,00	4.568.670.000	37,00	4.568.670.000	40,00	4.568.670.000	42,00	5.306.974.000	45,00	5.306.974.000
			IRB		31,05	33,00		35,00		37,00		40,00		42,00		45,00	
		Kecamatan Ulujami					4.780.627.000		4.109.321.000		4.109.321.000		4.109.321.000		4.780.627.000		4.780.627.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		35,34	35,37	4.780.627.000	35,40	4.109.321.000	35,44	4.109.321.000	35,47	4.109.321.000	35,50	4.780.627.000	35,53	4.780.627.000
			IRB		45,18	45,20		46,08		46,12		46,14		46,16		46,18	
		Kecamatan Warungring					2.917.859.000		2.494.405.000		2.494.405.000		2.494.405.000		2.917.859.000		2.917.859.000
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP		38,08	38,58	2.917.859.000	39,08	2.494.405.000	39,58	2.494.405.000	40,08	2.494.405.000	40,58	2.917.859.000	41,08	2.917.859.000
			IRB		26,28	26,58		27,08		27,58		28,08		28,58		29,08	

Tabel 7.2.b. Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026

No. Rek Ur	BU	Pr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
			KABUPATEN PEMALANG	2.798.606.871.000	2.724.256.887.000	2.756.561.315.000	2.855.175.408.000	2.856.207.278.000	2.900.392.588.000						
			Dindikbud	972.693.459.000	912.514.000.000	912.556.000.000	912.591.000.000	912.631.000.000	912.671.000.000						
1	01		Program Penunjang OPD	707.125.911.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000	637.126.000.000						
			URUSAN PENDIDIKAN	263.462.548.000	273.463.000.000	273.485.000.000	273.510.000.000	273.535.000.000	273.560.000.000						
			URUSAN KEBUDAYAAN	2.105.000.000	1.925.000.000	1.945.000.000	1.955.000.000	1.970.000.000	1.985.000.000						
			Dinas Kesehatan	412.211.209.000	415.438.159.000	415.444.000.000	415.459.000.000	415.479.000.000	415.499.000.000						
1	01		Program Penunjang OPD	105.933.883.750	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000	100.934.000.000						
			URUSAN KESEHATAN	306.277.325.250	314.504.159.000	314.510.000.000	314.525.000.000	314.545.000.000	314.565.000.000						
			DPU-TR	201.296.512.000	342.000.000.000	345.500.000.000	377.210.000.000	379.788.990.000	394.361.979.000						
1	01		Program Penunjang OPD	32.559.695.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000	26.900.000.000						
			URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	168.736.817.000	315.100.000.000	318.600.000.000	350.310.000.000	352.888.990.000	367.461.979.000						
			Disperkim	74.810.991.000	53.128.505.000	53.162.000.000	53.197.000.000	53.232.000.000	62.827.000.000						
1	01		Program Penunjang OPD	26.921.965.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000	22.022.000.000						
			URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	47.569.026.000	30.786.505.000	30.810.000.000	30.835.000.000	30.860.000.000	40.445.000.000						
			URUSAN PERTANAHAN	320.000.000	320.000.000	330.000.000	340.000.000	350.000.000	360.000.000						
			Satpol PP	15.632.756.000	13.796.026.000	13.806.026.000	13.816.026.000	13.826.026.000	13.836.026.000						
1	01		Program Penunjang OPD	12.307.756.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000	10.471.026.000						
			URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.325.000.000	3.325.000.000	3.335.000.000	3.345.000.000	3.355.000.000	3.365.000.000						
			BPBD	13.396.239.000	11.593.816.000	11.603.816.000	11.613.816.000	11.623.816.000	11.633.816.000						
1	01		Program Penunjang OPD	7.396.239.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000	6.593.816.000						
			URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.000.000.000	5.000.000.000	5.010.000.000	5.020.000.000	5.030.000.000	5.040.000.000						

19

No. Rek	Ur	BU	Pr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
				Dinsos PPKB PPPA	36.715.002.000	35.008.060.000	35.088.000.000	35.168.000.000	35.243.000.000	35.338.000.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	7.677.737.400	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000	5.978.000.000						
				URUSAN SOSIAL	15.254.910.500	15.488.560.000	15.520.000.000	15.545.000.000	15.570.000.000	15.595.000.000						
				URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.252.373.100	2.011.500.000	2.045.000.000	2.085.000.000	2.120.000.000	2.175.000.000						
				URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.529.981.000	11.530.000.000	11.545.000.000	11.560.000.000	11.575.000.000	11.590.000.000						
				Disnaker	11.699.564.000	10.817.000.000	10.838.000.000	10.859.000.000	10.880.000.000	10.901.000.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	6.965.564.000	6.066.000.000	6.066.000.000	6.066.000.000	6.066.000.000	6.066.000.000						
				URUSAN TENAGA KERJA	4.444.000.000	4.458.000.000	4.476.000.000	4.494.000.000	4.512.000.000	4.530.000.000						
				URUSAN TRANSMIGRASI	290.000.000	293.000.000	296.000.000	299.000.000	302.000.000	305.000.000						
				Dinas Pertanian	41.620.750.000	35.904.876.000	35.932.000.000	35.967.000.000	36.007.000.000	36.052.000.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	21.321.781.000	18.822.000.000	18.822.000.000	18.822.000.000	18.822.000.000	18.822.000.000						
				URUSAN PANGAN	2.008.300.000	2.013.750.000	2.025.000.000	2.045.000.000	2.070.000.000	2.090.000.000						
				URUSAN PERTANIAN	18.290.669.000	15.069.126.000	15.085.000.000	15.100.000.000	15.115.000.000	15.140.000.000						
				Dinas Lingkungan Hidup	33.494.955.000	29.588.246.000	31.325.446.000	31.480.446.000	31.625.446.000	31.770.446.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	19.386.155.000	16.885.446.000	16.885.446.000	16.885.446.000	16.885.446.000	16.885.446.000						
				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	14.108.800.000	12.702.800.000	14.440.000.000	14.595.000.000	14.740.000.000	14.885.000.000						
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.786.634.000	12.025.856.000	12.050.000.000	12.160.000.000	12.275.000.000	12.295.000.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	10.239.706.000	9.040.000.000	9.040.000.000	9.040.000.000	9.040.000.000	9.040.000.000						
				URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.546.928.000	2.985.856.000	3.010.000.000	3.120.000.000	3.235.000.000	3.255.000.000						
				Dinpermasdes	13.013.462.000	12.068.255.000	12.126.000.000	12.131.000.000	12.161.000.000	12.186.000.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	6.960.812.072	6.461.000.000	6.461.000.000	6.461.000.000	6.461.000.000	6.461.000.000						
				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.052.649.928	5.607.255.000	5.665.000.000	5.670.000.000	5.700.000.000	5.725.000.000						
				Dinas Perhubungan	19.397.606.000	16.998.119.000	17.031.000.000	27.031.000.000	22.081.000.000	18.296.000.000						
	1	01	01	Program Penunjang OPD	11.031.050.590	9.531.000.000	9.531.000.000	9.531.000.000	9.531.000.000	9.531.000.000						

No. Rek Ur	BU Pr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		URUSAN PERHUBUNGAN	8.366.555.410	7.467.119.000	7.500.000.000	17.051.000.000	17.071.000.000	17.500.000.000	17.500.000.000	12.550.000.000	8.765.000.000			
1	01	Dinas Kominfo Program Penunjang OPD	20.018.710.000	17.026.383.000	17.041.000.000	17.051.000.000	17.071.000.000	17.041.000.000	17.051.000.000	17.071.000.000	17.091.000.000			
		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.285.730.100	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000	7.586.000.000			
		URUSAN STATISTIK	10.090.387.000	8.797.383.000	8.805.000.000	8.810.000.000	8.820.000.000	8.805.000.000	8.810.000.000	8.820.000.000	8.830.000.000			
		URUSAN PERSANDIAN	349.796.000	350.000.000	355.000.000	360.000.000	365.000.000	355.000.000	360.000.000	365.000.000	370.000.000			
			292.796.900	293.000.000	295.000.000	295.000.000	300.000.000	295.000.000	295.000.000	300.000.000	305.000.000			
1	01	Diskoperindag Program Penunjang OPD	40.208.869.000	34.653.588.000	34.759.000.000	34.819.000.000	34.884.000.000	34.759.000.000	34.819.000.000	34.884.000.000	34.954.000.000			
		URUSAN KOPERASI UKM	23.873.869.000	22.074.000.000	22.074.000.000	22.074.000.000	22.074.000.000	22.074.000.000	22.074.000.000	22.074.000.000	22.074.000.000			
		URUSAN PERDAGANGAN	3.685.000.000	3.690.000.000	3.715.000.000	3.740.000.000	3.765.000.000	3.715.000.000	3.740.000.000	3.765.000.000	3.790.000.000			
		URUSAN PERINDUSTRIAN	11.150.000.000	7.309.588.000	7.375.000.000	7.400.000.000	7.425.000.000	7.375.000.000	7.400.000.000	7.425.000.000	7.455.000.000			
			1.500.000.000	1.580.000.000	1.595.000.000	1.605.000.000	1.620.000.000	1.595.000.000	1.605.000.000	1.620.000.000	1.635.000.000			
1	01	DPM-PTSP Program Penunjang OPD	9.371.768.000	8.470.909.000	13.870.938.000	11.884.199.000	8.919.199.000	13.870.938.000	11.884.199.000	8.919.199.000	8.969.199.000			
		URUSAN PENANAMAN MODAL	7.994.998.150	6.979.199.000	6.979.199.000	6.979.199.000	6.979.199.000	6.979.199.000	6.979.199.000	6.979.199.000	6.979.199.000			
			1.376.769.850	1.491.710.000	6.891.739.000	4.905.000.000	1.940.000.000	6.891.739.000	4.905.000.000	1.940.000.000	1.990.000.000			
1	01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahrag	28.891.720.000	29.781.086.000	35.971.000.000	34.771.653.000	30.018.000.000	35.971.000.000	34.771.653.000	30.018.000.000	33.044.000.000			
		Program Penunjang OPD	10.811.720.000	9.012.000.000	9.012.000.000	9.012.000.000	9.012.000.000	9.012.000.000	9.012.000.000	9.012.000.000	9.012.000.000			
		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	7.670.000.000	7.678.000.000	7.689.000.000	7.700.000.000	7.711.000.000	7.689.000.000	7.700.000.000	7.711.000.000	7.722.000.000			
		URUSAN PARIWISATA	10.410.000.000	13.091.086.000	19.270.000.000	18.059.653.000	13.295.000.000	19.270.000.000	18.059.653.000	13.295.000.000	16.310.000.000			
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.176.580.000	6.303.850.000	6.313.850.000	6.328.850.000	6.358.850.000	6.313.850.000	6.328.850.000	6.358.850.000	6.418.850.000			
1	01	Program Penunjang OPD	4.857.423.000	4.383.850.000	4.383.850.000	4.383.850.000	4.383.850.000	4.383.850.000	4.383.850.000	4.383.850.000	4.383.850.000			
		URUSAN PERPUSTAKAAN	1.818.532.000	1.440.000.000	1.445.000.000	1.455.000.000	1.470.000.000	1.445.000.000	1.455.000.000	1.470.000.000	1.525.000.000			
		URUSAN KEARSIPAN	500.625.000	480.000.000	485.000.000	490.000.000	505.000.000	485.000.000	490.000.000	505.000.000	510.000.000			
		Dinas Perikanan	15.926.128.000	13.545.546.000	13.551.000.000	14.466.000.000	14.481.000.000	13.551.000.000	14.466.000.000	14.481.000.000	14.496.000.000			
1	01	Program Penunjang OPD	7.906.480.900	6.906.000.000	6.906.000.000	6.906.000.000	6.906.000.000	6.906.000.000	6.906.000.000	6.906.000.000	6.906.000.000			
		URUSAN PERIKANAN	8.019.647.100	6.639.546.000	6.645.000.000	7.560.000.000	7.575.000.000	6.645.000.000	7.560.000.000	7.575.000.000	7.590.000.000			
1	01	SEKRETARIAT DAERAH Program Penunjang OPD	50.912.832.000	43.302.560.000	43.309.560.000	43.324.560.000	43.339.560.000	43.309.560.000	43.324.560.000	43.339.560.000	47.967.038.000			
			35.437.038.200	30.824.560.000	30.824.560.000	30.824.560.000	30.824.560.000	30.824.560.000	30.824.560.000	30.824.560.000	35.437.038.000			

Ur	No. Rek		URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	BU	Pr		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	15.475.793.800	12.478.000.000	12.485.000.000	12.500.000.000	12.515.000.000	12.530.000.000
			SEKRETARIAT DPRD	60.855.523.000	51.759.052.000	51.762.000.000	51.767.000.000	51.772.000.000	56.776.978.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	44.616.977.950	39.617.000.000	39.617.000.000	39.617.000.000	39.617.000.000	44.616.978.000
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	16.238.545.050	12.142.052.000	12.145.000.000	12.150.000.000	12.155.000.000	12.160.000.000
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.300.004.000	13.013.013.000	13.194.999.000	13.646.000.000	13.771.000.000	15.295.724.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	9.935.724.000	8.536.000.000	8.536.000.000	8.536.000.000	8.536.000.000	9.935.724.000
			PERENCANAAN	4.103.200.000	3.415.933.000	3.590.000.000	3.850.000.000	3.970.000.000	4.090.000.000
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.261.080.000	1.061.080.000	1.068.999.000	1.260.000.000	1.265.000.000	1.270.000.000
			BPKAD	550.036.990.000	483.128.804.000	491.356.444.000	545.728.298.000	545.784.000.000	549.483.850.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	12.383.850.000	9.384.000.000	9.384.000.000	9.384.000.000	9.384.000.000	12.383.850.000
			KEUANGAN	537.653.140.000	473.744.804.000	481.972.444.000	536.344.298.000	536.400.000.000	537.100.000.000
			Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.848.460.000	13.778.441.000	19.130.086.000	19.033.410.000	19.543.397.000	21.811.667.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	12.197.312.500	11.697.000.000	11.697.000.000	11.697.000.000	11.697.000.000	12.197.312.000
			KEUANGAN	1.651.147.500	2.081.441.000	7.433.086.000	7.336.410.000	7.846.397.000	9.614.355.000
			BKD	17.647.571.000	15.009.674.000	15.009.000.000	16.699.000.000	16.709.000.000	17.618.941.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	9.608.941.325	8.709.000.000	8.709.000.000	8.709.000.000	8.709.000.000	9.608.941.000
			KEPEGAWAIAN	8.038.629.675	6.300.674.000	6.300.000.000	7.990.000.000	8.000.000.000	8.010.000.000
			INSPEKTORAT DAERAH	15.180.747.000	12.911.582.000	12.911.000.000	13.471.000.000	13.476.000.000	15.186.300.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	11.261.299.298	9.561.000.000	9.561.000.000	9.561.000.000	9.561.000.000	11.261.300.000
			Unsur Pengawasan	3.919.447.702	3.350.582.000	3.350.000.000	3.910.000.000	3.915.000.000	3.925.000.000
			Kecamatan Moga	3.188.436.000	2.811.840.000	2.826.840.000	2.841.840.000	3.255.686.000	3.270.686.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	2.935.686.000	2.536.840.000	2.536.840.000	2.536.840.000	2.935.686.000	2.935.686.000
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	252.750.000	275.000.000	290.000.000	305.000.000	320.000.000	335.000.000
			Kecamatan Pulosari	3.445.098.000	3.030.137.000	3.045.137.000	3.060.137.000	3.502.099.000	3.517.099.000
1	01	01	Program Penunjang OPD	2.978.099.300	2.551.137.000	2.551.137.000	2.551.137.000	2.978.099.000	2.978.099.000

Ur	No. Rek		URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
	BU	Pr		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	466.998.700	479.000.000	494.000.000	509.000.000	524.000.000	539.000.000						
			Kecamatan Belik	3.534.058.000	3.105.800.000	3.120.800.000	3.135.800.000	3.587.906.000	3.602.906.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	3.002.906.200	2.565.800.000	2.565.800.000	2.565.800.000	3.002.906.000	3.002.906.000						
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	531.151.800	540.000.000	555.000.000	570.000.000	585.000.000	600.000.000						
			Kecamatan Watukumpul	3.171.544.000	2.797.473.000	2.812.473.000	2.827.473.000	3.225.720.000	3.240.720.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	2.840.720.000	2.457.473.000	2.457.473.000	2.457.473.000	2.840.720.000	2.840.720.000						
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	330.824.000	340.000.000	355.000.000	370.000.000	385.000.000	400.000.000						
			Kecamatan Bodeh	3.783.230.000	3.217.726.000	3.232.726.000	3.247.726.000	3.848.285.000	3.863.285.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	3.398.285.000	2.812.726.000	2.812.726.000	2.812.726.000	3.398.285.000	3.398.285.000						
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	384.945.000	405.000.000	420.000.000	435.000.000	450.000.000	465.000.000						
			Kecamatan Bantarbolang	3.447.892.000	3.032.513.000	3.047.513.000	3.062.513.000	3.501.062.000	3.516.062.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	3.115.062.000	2.691.513.000	2.691.513.000	2.691.513.000	3.115.062.000	3.115.062.000						
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	332.830.000	341.000.000	356.000.000	371.000.000	386.000.000	401.000.000						
			Kecamatan Randudongkal	3.542.706.000	3.113.154.000	3.128.154.000	3.143.154.000	3.597.202.000	3.612.202.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	2.987.202.400	2.548.154.000	2.548.154.000	2.548.154.000	2.987.202.000	2.987.202.000						
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	555.503.600	565.000.000	580.000.000	595.000.000	610.000.000	625.000.000						
			Kecamatan Penalang	23.258.918.000	19.782.256.000	20.233.000.000	21.341.000.000	23.265.960.000	23.260.740.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	15.330.960.216	13.431.000.000	13.431.000.000	13.431.000.000	15.330.960.000	15.330.960.000						
			Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	7.927.957.784	6.351.256.000	6.802.000.000	7.910.000.000	7.935.000.000	7.929.780.000						
			Kecamatan Taman	9.569.099.000	8.138.743.000	8.361.000.000	8.431.000.000	9.550.560.000	9.620.560.000						
1	01	01	Program Penunjang OPD	7.175.559.114	6.176.000.000	6.176.000.000	6.176.000.000	7.175.560.000	7.175.560.000						

Ur	No. Rek	BU	Pr	URUSAN/ OPD/ PROGRAM	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
				Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	2.393.539.886	1.962.743.000	2.185.000.000	2.255.000.000	2.375.000.000	2.445.000.000						
				Kecamatan Petarukan	6.297.830.000	5.356.452.000	5.371.452.000	5.386.452.000	6.365.803.000	6.380.803.000						
1	01		01	Program Penunjang OPD	4.708.053.000	3.743.702.000	3.743.702.000	3.743.702.000	4.708.053.000	4.708.053.000						
				Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	1.589.777.000	1.612.750.000	1.627.750.000	1.642.750.000	1.657.750.000	1.672.750.000						
				Kecamatan Ampelgading	3.712.606.000	3.257.659.000	3.272.659.000	3.287.659.000	3.781.251.000	3.796.251.000						
1	01		01	Program Penunjang OPD	3.366.251.000	2.887.659.000	2.887.659.000	2.887.659.000	3.366.251.000	3.366.251.000						
				Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	346.355.000	370.000.000	385.000.000	400.000.000	415.000.000	430.000.000						
				Kecamatan Comal	6.855.390.000	5.830.670.000	6.003.670.000	6.123.670.000	6.886.974.000	6.911.974.000						
1	01		01	Program Penunjang OPD	5.306.974.100	4.568.670.000	4.568.670.000	4.568.670.000	5.306.974.000	5.306.974.000						
				Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	1.548.415.900	1.262.000.000	1.435.000.000	1.555.000.000	1.580.000.000	1.605.000.000						
				Kecamatan Ulujami	5.029.045.000	4.377.321.000	4.402.321.000	4.427.321.000	5.123.627.000	5.148.627.000						
1	01		01	Program Penunjang OPD	4.780.627.000	4.109.321.000	4.109.321.000	4.109.321.000	4.780.627.000	4.780.627.000						
				Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	248.418.000	268.000.000	293.000.000	318.000.000	343.000.000	368.000.000						
				Kecamatan Warungpring	3.319.609.000	2.923.405.000	2.938.405.000	2.953.405.000	3.391.859.000	3.406.859.000						
1	01		01	Program Penunjang OPD	2.917.859.000	2.494.405.000	2.494.405.000	2.494.405.000	2.917.859.000	2.917.859.000						
				Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)	401.750.000	429.000.000	444.000.000	459.000.000	474.000.000	489.000.000						
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.306.369.000	9.916.332.000	10.123.000.000	10.233.000.000	10.343.000.000	10.463.000.000						
1	01		01	Program Penunjang OPD	4.407.861.000	3.908.000.000	3.908.000.000	3.908.000.000	3.908.000.000	3.908.000.000						
				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.898.508.000	6.008.332.000	6.215.000.000	6.325.000.000	6.435.000.000	6.555.000.000						

7.2.c. Tabel Perbandingan Kapasitas Riil Anggaran dengan Kebutuhan Pendanaan Kab. Pemalang Tahun 2021-2026

No	RINCIAN	TAHUN (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Anggaran	2.509.954.151.000	2.598.246.406.000	2.610.622.139.000	2.627.602.779.000	2.646.312.476.000	2.667.992.412.000
2	Kebutuhan Belanja	2.798.606.871.000	2.724.256.887.000	2.756.561.315.000	2.855.175.408.000	2.856.207.278.000	2.900.392.588.000
a.	Pemenuhan SPM & Urusan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar	810.625.626.750	957.667.224.000	961.270.000.000	993.090.000.000	995.783.990.000	1.020.031.979.000
b.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan & Unsur lainnya	742.729.518.685	655.007.366.000	683.709.018.000	750.503.111.000	739.571.147.000	742.395.885.000
c.	Program Penunjang OPD (gaji, TPP & kesejahteraan)	1.245.251.725.565	1.111.582.297.000	1.111.582.297.000	1.111.582.297.000	1.120.852.141.000	1.137.964.724.000
3	Selisih	(288.652.720.000)	(126.010.481.000)	(145.939.176.000)	(227.572.629.000)	(209.894.802.000)	(232.400.176.000)
4	Pembiayaan Netto	288.652.720.000	126.010.481.000	145.939.176.000	227.572.629.000	209.894.802.000	232.400.176.000
5	Selisih Netto	-	-	-	-	-	-
Program prioritas (2a+2b)		1.553.355.145.435	1.612.674.590.000	1.644.979.018.000	1.743.593.111.000	1.735.355.137.000	1.762.427.864.000